

## PERAN PENDIDIKAN IPS DALAM MENJADIKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG DEMOKRATIS

Leoni Cicilia Mamusung<sup>1</sup>, Yosepa Sani<sup>2</sup>, Rahmania Rahman<sup>3</sup>

[cicilialeoni05@gmail.com](mailto:cicilialeoni05@gmail.com)<sup>1</sup>, [yosepasani22@gmail.com](mailto:yosepasani22@gmail.com)<sup>2</sup>, [rahmaniarahman@unima.ac.id](mailto:rahmaniarahman@unima.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Negeri Manado

### ABSTRAK

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memegang peran strategis dalam membentuk masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui pembelajaran IPS, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi aktif, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun, pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui IPS menghadapi berbagai hambatan, seperti kurikulum yang padat, kompetensi guru yang belum optimal, serta pengaruh lingkungan eksternal yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan pendidikan IPS yang meliputi peningkatan kompetensi guru, penyusunan materi yang relevan, penerapan metode pembelajaran interaktif, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik ini, pendidikan IPS diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif dan berkelanjutan sehingga menghasilkan generasi muda yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Kata Kunci :** Pendidikan IPS, Nilai Demokrasi, Pembelajaran Demokratis, Partisipasi Warga, Strategi Penguatan.

### ABSTRACT

*Social Studies (IPS) education plays a strategic role in shaping a democratic Indonesian society. Through social studies learning, students are introduced to democratic values such as active participation, tolerance, and respect for diversity. However, the implementation of democratic education through social studies faces various obstacles, such as a dense curriculum, suboptimal teacher competency, and less than supportive external environmental influences. Therefore, strategies are needed to strengthen social studies education, including improving teacher competency, developing relevant materials, implementing interactive learning methods, and collaborating with schools, families, and the community. With this holistic approach, social studies education is expected to instill democratic values effectively and sustainably, thus producing a young generation that is critical, tolerant, and responsible in social and national life.*

**Keywords:** Social Studies Education, Democratic Values, Democratic Learning, Citizen Participation, Strengthening Strategies.

### PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta jaminan terhadap keadilan sosial. Sistem ini menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, melainkan juga merupakan cara hidup yang menghargai perbedaan, mengedepankan dialog, dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin kompleks, demokrasi menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan progresif. Hal ini menjadi sangat relevan di Indonesia, mengingat dinamika sosial dan keberagaman budaya yang tinggi (Kasih 2018).

Indonesia sebagai negara dengan latar belakang multikultural, multietnis, dan multireligius memiliki tantangan besar dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik. Sistem demokrasi yang dianut sejak era reformasi menuntut partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial secara luas. Namun demikian, penerapan demokrasi di

Indonesia tidak terlepas dari tantangan, seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat, lemahnya budaya dialog, serta meningkatnya polarisasi sosial di media dan kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya untuk menciptakan masyarakat demokratis tidak bisa hanya dilakukan oleh negara melalui sistem politik, tetapi juga melalui proses pendidikan sejak dini (Rosyad et al. 2022).

Pendidikan merupakan medium strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir warga negara. Melalui pendidikan, nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, dan toleransi dapat ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan juga berperan sebagai alat untuk menciptakan ruang dialektika, diskusi, dan pertukaran gagasan di kalangan peserta didik. Sekolah sebagai institusi formal tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan nilai moral peserta didik (Galuh et al. 2021). Dalam konteks ini, pendidikan demokrasi tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus diinternalisasikan dalam praktik pembelajaran dan budaya sekolah. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam upaya ini adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar hingga menengah memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman siswa tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui IPS, siswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar sosial, ekonomi, politik, hukum, serta budaya, yang semuanya menjadi landasan penting dalam kehidupan demokratis. Materi IPS secara eksplisit maupun implisit memuat nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, partisipasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman (Rahmad 2016). IPS bukan hanya menjadi sarana untuk mengenalkan struktur sosial dan politik negara, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pendidikan IPS dapat dijadikan sebagai sarana efektif dalam menumbuhkan kesadaran demokratis peserta didik sejak usia dini.

Dalam rangka mengkaji lebih dalam peran pendidikan IPS dalam membentuk masyarakat demokratis di Indonesia, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana nilai-nilai demokrasi tercermin dalam kurikulum dan materi pembelajaran IPS? Kedua, sejauh mana peran guru dan metode pembelajaran dapat mendukung internalisasi nilai-nilai demokrasi tersebut kepada siswa? Ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran IPS? Dan keempat, strategi atau langkah konkret apa yang dapat diterapkan agar pendidikan IPS benar-benar menjadi sarana pembentukan karakter demokratis dalam diri peserta didik? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dan terpercaya (Widyaningsih 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pendidikan IPS berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di kalangan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran guru dan metode pembelajaran dalam internalisasi nilai demokrasi, mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan strategi penguatan agar pembelajaran IPS lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengajar IPS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis nilai-nilai demokrasi serta secara akademis dapat menjadi referensi dalam pengembangan pendidikan demokrasi di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru, pengembang kurikulum, dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembelajaran IPS yang

lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Guru dapat menggunakan temuan ini untuk mengevaluasi metode pengajaran yang digunakan dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip pembelajaran demokratis yang partisipatif dan reflektif. Bagi pengembang kurikulum, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya penyusunan materi yang relevan dan kontekstual. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya khasanah literatur dalam bidang pendidikan IPS dan demokrasi, serta memberikan dasar teoritis dan praktis bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, pendidikan IPS diharapkan benar-benar menjadi landasan kuat dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau library research sebagai metode utama untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data yang relevan dengan topik peran pendidikan IPS dalam membentuk masyarakat Indonesia yang demokratis. Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, baik berupa artikel jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum dan standar pendidikan di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi dan memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam pendidikan IPS secara konseptual dan praktis berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data primer langsung dari lapangan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel-artikel jurnal yang terindeks di portal SINTA (Science and Technology Index) dan jurnal nasional lainnya yang telah melalui proses peer-review serta memiliki reputasi akademik yang baik. Selain itu, buku-buku akademik dan dokumen kebijakan pendidikan, seperti kurikulum nasional dan standar kompetensi pembelajaran IPS, turut menjadi bahan kajian penting. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian kata kunci spesifik yang relevan dengan tema penelitian, seperti “Pendidikan IPS”, “nilai demokrasi”, “pembelajaran demokratis”, dan “partisipasi warga”. Seluruh artikel dan literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, meliputi relevansi isi, konteks geografis Indonesia, serta masa publikasi yang relatif baru agar hasil kajian tetap mutakhir dan aplikatif dalam konteks pendidikan saat ini.

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses ini meliputi pembacaan mendalam terhadap literatur yang dipilih, pengidentifikasian tema-tema utama seperti nilai-nilai demokrasi dalam materi IPS, peran guru dan metode pembelajaran, hambatan dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi, serta strategi penguatan pendidikan IPS. Selanjutnya, tema-tema tersebut dikategorisasikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran pendidikan IPS dalam membangun masyarakat demokratis. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya memberikan deskripsi teori dan fakta, tetapi juga menyajikan sintesis hasil kajian yang dapat dijadikan rekomendasi praktis bagi pengembangan pendidikan demokrasi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Nilai-Nilai Demokrasi yang Ditanamkan melalui Kurikulum IPS**

Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap demokratis peserta didik karena materi yang diajarkan secara langsung berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurikulum IPS tidak hanya berisi pengetahuan faktual tentang sejarah,

geografi, ekonomi, dan sosial, tetapi juga secara eksplisit menyisipkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, penghormatan terhadap keberagaman budaya dan sosial, sikap toleran terhadap perbedaan, serta keadilan sosial. Ini berarti, pembelajaran IPS tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga berperan dalam pengembangan sikap dan karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, kurikulum IPS yang efektif harus mampu mengintegrasikan isu-isu kontemporer yang sedang terjadi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pengintegrasian isu aktual ini penting agar siswa tidak hanya belajar teori semata, melainkan juga memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi diaplikasikan dalam situasi nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Misalnya, isu tentang toleransi antar etnis di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pemilu, atau tantangan global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial, semua dapat dijadikan bahan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan kesadaran demokratis siswa.

Sebagai contoh konkret, penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam jurnal “Transformasi Kurikulum Pendidikan IPS dalam Kesiapan Menyambut Era Society 5.0” menggarisbawahi bahwa pendidikan IPS harus menumbuhkan berbagai kemampuan penting bagi peserta didik, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, sikap demokratis, kemampuan bekerja sama (kolaboratif), dan kepekaan sosial. Dengan kata lain, kurikulum IPS tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk peserta didik agar memiliki karakter dan sikap yang mampu menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum semacam ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Widyaningsih 2021).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS melalui kurikulum yang dirancang secara tepat merupakan salah satu instrumen utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pendidikan IPS berperan tidak hanya sebagai pengantar pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter demokratis yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

## **2. Peran Guru dan Metode Pembelajaran**

Guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pendidikan, terutama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik melalui mata pelajaran IPS. Tidak cukup hanya menjadi penyampai materi secara verbal, guru harus berperan sebagai fasilitator yang mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis, terbuka, dan partisipatif. Dalam konteks pembelajaran demokrasi, guru bertugas membangun lingkungan belajar di mana siswa merasa dihargai, bebas mengemukakan pendapat, serta didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Sikap guru yang inklusif dan demokratis ini menjadi contoh langsung bagi siswa tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, guru juga berperan sebagai model atau teladan dalam menampilkan sikap demokratis. Siswa belajar tidak hanya dari materi pelajaran, tetapi juga dari cara guru memperlakukan mereka dan berinteraksi dalam proses belajar-mengajar. Guru yang menghormati keberagaman pendapat, mampu mendengarkan secara aktif, serta memfasilitasi dialog yang sehat, akan membentuk budaya kelas yang mendukung pembentukan karakter demokratis. Hal ini penting karena demokrasi bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah cara hidup yang harus dipraktikkan secara nyata, termasuk di lingkungan sekolah.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat menentukan keberhasilan internalisasi nilai demokrasi. Berbagai metode aktif seperti diskusi kelompok, debat,

simulasi, studi kasus, dan proyek sosial menjadi alat yang efektif dalam proses pembelajaran IPS. Melalui diskusi kelompok, misalnya, siswa belajar bagaimana mengemukakan pendapat secara santun, mendengarkan argumen orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Simulasi dan studi kasus memungkinkan siswa menghadapi situasi nyata atau tiruan yang menuntut mereka untuk berpikir kritis, mengambil keputusan secara demokratis, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Proyek sosial, seperti kerja bakti atau kampanye kesadaran sosial, memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Budi, Santosa, and Hidayat 2022).

Penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menegaskan bahwa guru harus cermat dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai agar nilai-nilai demokrasi dapat tersampaikan dengan optimal. Materi yang dipilih harus relevan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman, sehingga siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga memahami dan merasakan pentingnya demokrasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif menjadi kunci agar siswa tidak pasif menerima informasi, tetapi aktif mengolah dan menerapkan nilai-nilai tersebut (Hamisa and Murdiyono 2018).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (PKn), metode pembelajaran seperti diskusi kelompok sangat efektif dalam membangun sikap demokratis dan meningkatkan partisipasi siswa dalam organisasi maupun kegiatan sosial di sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian, guru dalam peranannya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial dan politik siswa sebagai calon warga negara yang demokratis. Guru menjadi agen perubahan yang membantu membentuk generasi muda yang kritis, mandiri, dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi.

Kesimpulannya, peran guru dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan IPS sangat krusial untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di kalangan peserta didik. Guru yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis dan menggunakan metode yang tepat akan menghasilkan siswa yang tidak hanya paham konsep demokrasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di masyarakat luas.

### **3. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi melalui IPS**

Pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui mata pelajaran IPS menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu hambatan utama yang sering ditemukan adalah kurikulum yang terlalu padat dan berisi banyak materi. Kondisi ini menyebabkan guru dan siswa kesulitan untuk fokus dan mendalami secara menyeluruh nilai-nilai demokrasi yang ingin ditanamkan. Dengan begitu banyaknya materi yang harus dikuasai dalam waktu terbatas, guru cenderung hanya mengajarkan isi materi secara sekilas atau bersifat hafalan saja, sehingga nilai-nilai demokrasi tidak terserap secara optimal oleh siswa. Hal ini berdampak pada lemahnya pemahaman dan penghayatan siswa terhadap pentingnya sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain masalah pada kurikulum, kompetensi guru juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi. Tidak semua guru IPS memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi secara efektif. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai mengenai pendidikan demokrasi dan metode pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai tersebut. Akibatnya, cara penyampaian materi yang kurang variatif dan kurang mengedepankan partisipasi aktif siswa membuat pembelajaran terasa monoton dan tidak menarik, sehingga motivasi siswa untuk belajar dan menginternalisasi nilai demokrasi

menjadi rendah.

Faktor eksternal juga memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan demokrasi melalui IPS. Lingkungan keluarga, media massa, serta budaya sosial di masyarakat kadang-kadang kurang mendukung pembentukan sikap demokratis pada siswa. Misalnya, di beberapa keluarga atau komunitas, sikap toleransi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mungkin kurang ditekankan, atau media yang dikonsumsi siswa cenderung menyajikan informasi yang bias dan tidak mendukung nilai-nilai demokrasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan yang dipraktikkan di lingkungan sekitar siswa, sehingga pendidikan demokrasi di sekolah menjadi kurang efektif.

Contoh konkret dari hambatan ini ditemukan dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam jurnal tentang “Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Politik”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hambatan yang muncul termasuk lingkungan yang kurang kondusif serta rendahnya motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran demokrasi. Siswa yang kurang termotivasi cenderung pasif dan tidak antusias dalam mengikuti kegiatan yang bertujuan menumbuhkan sikap demokratis. Selain itu, penelitian lain juga menyoroti bahwa materi pembelajaran IPS yang terlalu banyak dan beragam sering kali membuat siswa merasa kewalahan dan kehilangan minat untuk memahami secara mendalam nilai-nilai demokrasi. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik dan relevan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui IPS bukanlah hal yang mudah dan memerlukan perhatian serta upaya serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah dalam penyusunan kurikulum yang tepat, pengembangan kompetensi guru, hingga peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendukung nilai-nilai demokrasi. Mengatasi hambatan ini menjadi kunci keberhasilan pendidikan IPS dalam membentuk masyarakat Indonesia yang demokratis dan berbudaya toleransi.

#### **4. Strategi Penguatan Pendidikan IPS untuk Mewujudkan Masyarakat Demokratis**

Menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui IPS, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dalam menumbuhkan dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Strategi ini harus melibatkan berbagai aspek mulai dari peningkatan kapasitas guru, penyusunan materi yang relevan, penggunaan metode pembelajaran inovatif, hingga keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem Pendidikan (Kamil and Pramudiya 2016).

Pertama-tama, peningkatan kompetensi guru menjadi fondasi utama. Guru harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, terutama terkait dengan pemahaman konsep demokrasi, kemampuan mengajar secara interaktif, dan penerapan metode pembelajaran yang partisipatif. Guru yang kompeten dan percaya diri dalam menggunakan metode seperti diskusi, debat, simulasi, dan proyek sosial akan mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis dan menarik bagi siswa. Pelatihan ini juga membantu guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga nilai demokrasi dapat lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh siswa.

Kedua, materi IPS perlu disusun secara kontekstual dan relevan dengan isu-isu sosial yang sedang berkembang. Materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa—baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global—akan membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Misalnya, isu keberagaman budaya di daerah sekitar, pemilu, peran

warga dalam pembangunan daerah, atau tantangan sosial seperti intoleransi dan diskriminasi dapat dijadikan topik pembelajaran yang menarik dan mendorong siswa berpikir kritis serta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dengan materi yang kontekstual, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga belajar memahami dan menghargai dinamika sosial di sekitarnya, yang merupakan inti dari pendidikan demokrasi (Yahzinka 2019).

Selanjutnya, metode pembelajaran harus diupayakan agar lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Metode seperti diskusi kelompok, debat, simulasi peran, dan proyek sosial sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa, melatih keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan toleransi. Pembelajaran yang interaktif juga mencegah siswa menjadi pasif dan bosan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, proses pembelajaran IPS tidak hanya menjadi transfer pengetahuan, tetapi juga pengalaman nyata dalam berinteraksi secara demokratis (M.Danish Sumantri et al. 2025).

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan demokrasi yang holistik dan berkelanjutan. Pendidikan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, melainkan harus didukung oleh lingkungan keluarga yang mendidik, serta masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi. Misalnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan bersama dengan orang tua dan komunitas setempat, seperti dialog warga, kegiatan sosial, atau program pengembangan kewarganegaraan. Sinergi ini akan memperkuat pesan pendidikan demokrasi dan memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.

Pemanfaatan media dan teknologi juga merupakan strategi penting dalam penguatan pendidikan IPS. Dengan perkembangan teknologi digital, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video interaktif, platform diskusi online, serta aplikasi simulasi yang mendukung pembelajaran demokrasi secara menarik dan efektif. Media ini membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi, mengakses informasi terkini, serta mengembangkan keterampilan digital yang juga relevan dalam kehidupan demokratis di era modern (Diniyati, Salma, and Farhurahman 2024).

Penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menekankan bahwa transformasi kurikulum IPS dalam era Society 5.0 harus mengarah pada pembelajaran yang menarik, kreatif, dan demokratis agar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, jurnal dari Universitas Persada YAI (UPY) menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan politik yang memperkuat sikap demokratis siswa. Kedua sumber tersebut menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran sebagai kunci keberhasilan pendidikan demokrasi melalui IPS.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terpadu, pendidikan IPS akan lebih mampu mencetak generasi muda Indonesia yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang demokrasi, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini pada akhirnya akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran, dan kritis.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan IPS memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Kurikulum IPS yang dirancang secara tepat mampu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap keberagaman ke dalam materi pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkan

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dan metode pembelajaran yang interaktif serta partisipatif sangat menentukan keberhasilan pendidikan demokrasi melalui IPS. Guru sebagai fasilitator dan teladan yang demokratis dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter demokratis siswa.

Meski demikian, pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui IPS menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kurikulum yang terlalu padat, kurangnya kompetensi guru, serta pengaruh negatif dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi penguatan pendidikan IPS perlu dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada peningkatan kompetensi guru, penyusunan materi yang kontekstual, metode pembelajaran inovatif, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pendidikan IPS dapat berperan maksimal dalam membentuk generasi muda Indonesia yang demokratis, toleran, kritis, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Yusuf, Prasetya Santosa, and Arief Hidayat. 2022. "Penanaman Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS." 09(02): 192–204.
- Diniyati, Alfina, Nasywa Dinda Salma, and Oman Farhurahman. 2024. "Pemanfaatan Media Pembelajaran Digital Untuk Meningkatkan Literasi Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Di Sekolah Dasar." Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2: 97–110.
- Galuh, Azahra Dewanti, Delia Maharani, Latifah Meynawati, and Dinie Anggraeni. 2021. "Urgensi Nilai Dan Moral Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Pkn Di Sekolah Dasar." 5(6): 5169–78.
- Hamisa, Wilda, and Mukhamad Murdiyono. 2018. "Peran PKn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis Dan Partisipasi Siswa Dalam Organisasi Di SMA." Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS 5(2): 192–201. doi:10.21831/hsjpi.v5i2.11205.
- Kamil, Novi Maria, and Grafita Ari Pramudiya. 2016. "TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN IPS DALAM KESIAPAN MENYAMBUT ERA SOCIETY 5.0." 3(September 2016): 122–43.
- Kasih, Ekawahyu. 2018. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Jurnal Kajian Lemhannas RI 34(4): 1–87. [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf).
- M.Danish Sumantri, Allyah Zahirah, Bilal Bilal, and Sani Safitri. 2025. "Peran Teknologi Pada Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Terhadap Isu Global." SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 3(2): 01–10. doi:10.62383/sosial.v3i2.709.
- Rahmad. 2016. "Kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Sekolah Dasar." 2(1): 67–78. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797367985536.bib?lang=en>.
- Rosyad, Rifki, M. Taufiq Rahman, Paelani Setia, Mochammad Ziaul Haq, and R.F. Bhanu Pr viktoriahadi. 2022. Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi S2 Studi Agama. UIN Sunan Gunung Djati.
- Widyaningsih, Lenny. 2021. "PERAN GURU IPS DALAM PENANAMAN NILAI DEMOKRASI PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 1 WAY SEPUTIH." : 167–86.
- Yahzinka, Esti Mei. 2019. "PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK." Visipena Journal 7(1): 104–27.